



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANI ESTI NOVIA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **264378**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.882.140.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/125 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 448.700.000
2. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 433.440.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **704.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA LEXAM SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOTOR, YAMAHA X MAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000



7. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	200.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	219.584.139
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.005.724.139
III. HUTANG	Rp.	331.730.786
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.673.993.353

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.